

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memaparkan informasi bahwa peneliti tidak menjadi plagiat dalam pembuatan karya ilmiah ini. Selain itu, kajian pustaka juga digunakan sebagai pembanding untuk menemukan perbedaan dari isi keseluruhan karya ilmiah, dengan penelitian sebelumnya.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan yang terdiri dari banyak dimensi diantaranya adalah rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara dan kapasitas memadai serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Sementara menurut Soerjono Soekanto kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Kemiskinan diartikan sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup (*proper*). Dalam arti luas, Chambers (dalam Suryawati, 2005: 3-4) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu kemiskinan (*proper*), ketidak berdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*),

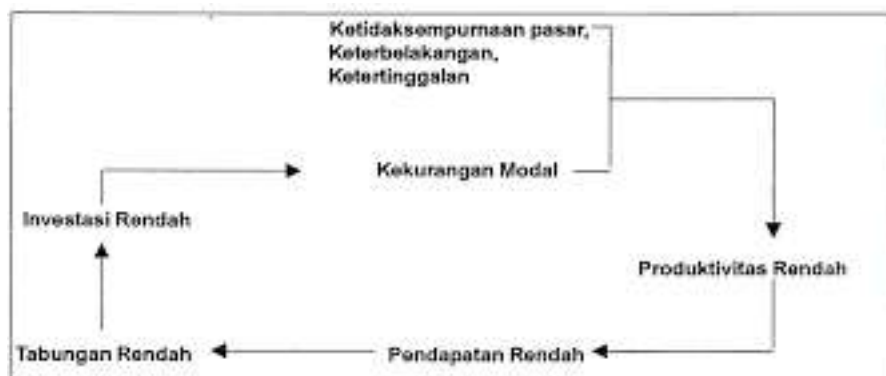
ketergantungan (*dependence*) dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005: 5).

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi jika seseorang atau sekelompok orang, laki-laki maupun perempuan tidak mampu untuk memenuhi hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar dimiliki oleh masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perbuatan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

2.1.1.2 Teori Kemiskinan

Sharp, *et.al* (1996) dalam Kuncoro (2017: 108) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena

rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Nurkse (dalam Kuncoro, 2017:132): adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.



Gambar 2.1 Lingkaran kemiskinan

Sumber: Kuncoro (2017)

Negara berkembang sampai saat ini masih identik dengan ketertinggalan berbagai aspek dari negara maju hal ini dikarenakan baik kekurangan modal maupun minimnya teknologi yang digunakan, akibatnya produktifitas yang dihasilkan seseorang notabenenya akan rendah dan otomatis akan mempengaruhi pendapatan seseorang tersebut akan rendah pula. Apabila pendapatan seseorang rendah, maka akan sulit untuk memenuhi akan barang kebutuhannya dan menyebabkan permintaan akan barang rendah pula. Permintaan barang yang rendah

tidak akan meningkatkan investasi seseorang, sehingga pembentukan modal yang seharusnya dapat ditingkatkan akan ikut rendah pula. Sehingga pendapatan yang tinggi dapat memutus lingkaran setan agar tidak larut mempengaruhi tabungan yang rendah dan investasi yang rendah. Apabila seseorang yang bekerja mendapatkan gaji yang tinggi, otomatis pendapatannya akan bertambah, dengan pendapatan tersebut maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya kearah yang lebih baik dan layak sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut Suryawati, (2005: 3) menegaskan bahwa faktor penyebab kemiskinan adanya faktor dari dalam diri sendiri untuk dapat segera mencukupi kebutuhan, dan tidak dibekali dengan kemampuan untuk mengolah sumber daya yang dimiliki seperti tingkat Pendidikan yang rendah dan keterampilan yang kurang. Selain itu juga faktor dari luar seperti adanya tidak adanya kebijakan yang memihak kepada masyarakat miskin.

2.1.1.3 Perhitungan Tingkat Kemiskinan

Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, sebaran dan kondisi kemiskinan diperlukan pengukuran kemiskinan yang tepat sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan akan efektif. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya menjadi instrument yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Pengukuran kemiskinan yang baik akan memungkinkan dalam melakukan evaluasi dampak dari pelaksanaan proyek, membandingkan kemiskinan antar waktu dan menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk menguranginya (World Bank, 2005).

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama

kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan itu indikator yang digunakan adalah *Head Count Index* (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Selain *head count index* (P_0) terdapat juga indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) atau P_1 dan indeks keparahan kemiskinan (*distributionally sensitive index*) atau P_2 yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke (Tambunan, 2001). Metode penghitungan ini merupakan dasar penghitungan persentase penduduk miskin untuk seluruh kabupaten/kota.

Rumus yang digunakan adalah:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Y_i}{Z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

Z = garis kemiskinan

i = rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

q = banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

N = jumlah penduduk

$\alpha = 0,1,2$

$\alpha = 0$; *poverty head count index* (P_0)

$\alpha = 1$; *poverty gap index* (P_1)

$\alpha = 2$; *poverty distributionally sensitive index* (P_2)

Head count index (P_0) merupakan jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Demikian

juga sebaliknya, bila angka P_0 besar maka menunjukkan tingginya jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Poverty Gap Index (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka ini memperlihatkan jurang (gap) antara pendapatan rata-rata yang diterima penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan secara rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Semakin tinggi angka ini maka semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Distributionally Sensitive Index (P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Angka ini memperlihatkan sensitivitas distribusi pendapatan antar kelompok miskin. Semakin kecil angka ini menunjukkan distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata. Sebagai contohnya dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penghitungan P_0 , P_1 dan P_2

Penduduk ke	Daerah – A				Daerah – B			
	Konsumsi *)	P/NP #)	$\left(\frac{Z - Y_i}{Z}\right)$	$\left(\frac{Z - Y_i}{Z}\right)^2$	Konsumsi *)	P/NP #)	$\left(\frac{Z - Y_i}{Z}\right)$	$\left(\frac{Z - Y_i}{Z}\right)^2$
1	250.000	NPoor	-	-	200.000	NPoor	-	-
2	210.000	NPoor	-	-	190.000	NPoor	-	-
3	150.000	NPoor	-	-	135.000	NPoor	-	-
4	125.000	NPoor	-	-	125.000	NPoor	-	-
5	110.000	NPoor	-	-	115.000	NPoor	-	-
6	105.000	NPoor	-	-	100.000	NPoor	-	-
7	75.000	Poor	0.25	0.0625	75.000	Poor	0.25	0.0625
8	50.000	Poor	0.50	0.2500	75.000	Poor	0.25	0.0625
9	50.000	Poor	0.50	0.2500	75.000	Poor	0.25	0.0625
10	25.000	Poor	0.75	0.5625	75.000	Poor	0.25	0.0625
$P_0 = \frac{Q}{N}$			= 4 / 10 = 0.4				= 4 / 10 = 0.4	
$P_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left(\frac{Z - Y_i}{Z}\right)$			= (1/10) (0.25+0.5+0.5+0.75) = 0.2				= (1/10) (0.25+0.25+0.25+0.25) = 0.1	
$P_2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left(\frac{Z - Y_i}{Z}\right)^2$			= 1/10 (0.0625+0.25+0.25+0.5625) = 0.1125				= 1/10 (0.0625+0.0625+0.0625+0.0625) = 0.0250	

Note: *) Rp/kapita/bulan; #) P=poor, NP=non-poor, dengan garis kemiskinan Z = Rp100.000/kapita/bulan.

Sumber : Tambunan (2001)

Daerah A dan daerah B memiliki P_0 yang sama yaitu sebesar 0,4 hal ini menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut penduduk miskinnya mencapai 0,4 atau sebesar 40 persen. Bila dilihat dari Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) atau P_1 kedua daerah tersebut berbeda. Untuk daerah A dapat dilihat P_1 adalah sebesar 0,2 sedangkan daerah B memiliki P_1 sebesar 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin didaerah A secara rata-rata lebih miskin bila dibandingkan dengan penduduk daerah B.

Bila dilihat dari indeks keparahan kemiskinan (*distributionally sensitive index*) atau P_2 , daerah A memiliki P_2 sebesar 0,1125 dan daerah B memiliki P_2 sebesar 0,0250. Walaupun kedua daerah ini memiliki persentase penduduk miskin (P_0) yang sama namun tingkat kemiskinan didaerah A lebih beragam dibandingkan daerah B.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Arsyad (2016: 80) kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum dengan pendapatan yang diterimanya maka dia dikatakan miskin.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan ini disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut

masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2005):

1. Kemiskinan Absolut

Suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar seperti pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang. Sementara garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata seseorang untuk kebutuhan pokok yang berkaitan dengan pemenuhan standar hidup yang sejahtera. Dan merupakan bentuk kemiskinan yang paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh sehingga menyebabkan adanya suatu ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan. Daerah yang belum terjangkau oleh program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal dan notabennya untuk memenuhi kebutuhan mereka akan sulit untuk mendapatkannya.

2. Kemiskinan Kultural

Bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif dan tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern seiring dengan berkembangnya teknologi sebagai akibat dari globalisasi. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemborosan atau tidak pernah hemat dan terutama akan sangat bergantung oleh hidup orang lain.

3. Kemiskinan Struktural

Bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

2.1.1.5 Penyebab Kemiskinan

Salah satu penyebab kemiskinan menurut (World Bank, 2010) adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Selain itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2017: 133), diantaranya adalah tingkat dan laju pertumbuhan output, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat inflasi, pajak dan subsidi. Selain

itu ada faktor dari investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam. Ketersediaan fasilitas umum, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan juga menjadi faktor penyebab kemiskinan. Dan terakhir kondisi alam, politik dalam negeri, bencana alam, dan peperangan.

2.1.1.6 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bappenas mempunyai makna yang relatif luas, yaitu dari berbagai sisi kebutuhan kehidupan, antara lain adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (5) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat kerja dan berusaha; (6) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (7) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (8) terbatasnya akses terhadap air bersih; (9) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (10) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (11) lemahnya jaminan rasa aman; (12) lemahnya partisipasi; (13) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (14) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat (Bappenas, 2004).

Indikator kemiskinan yang umum digunakan di Indonesia adalah garis

kemiskinan (*poverty line*). Badan Pusat Statistik menentukan batas garis kemiskinan di Indonesia berdasarkan besaran rupiah yang digunakan untuk dibelanjakan per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Indikator menurut BPS adalah:

1. Tidak miskin. adalah mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610,-
2. Hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488,- sampai Rp 350.610,- atau sekitar antara Rp 9.350,- sampai Rp11.687,- per orang per hari.
3. Hampir miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740,- sampai Rp 280.488,- atau sekitar antara Rp 7.780,- sampai Rp 9.350,- per orang per hari.
4. Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala Rp 233.740,- kebawah atau sekitar Rp 7.780,- kebawah per orang per hari.
5. Sangat miskin (kronis) tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlas pastinya (BPS., 2013).

2.1.1.7 Variabel-variabel yang Mempengaruhi Kemiskinan Masyarakat

Metode penentuan garis kemiskinan di Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu pendekatan yang menghitung jumlah penduduk miskin berdasarkan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Indikator utama yang digunakan adalah *Head Count Index* (HCI) atau Indeks Kemiskinan (P_0), yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menggunakan dua indikator tambahan dalam mengukur kemiskinan, yaitu:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P₁*), yang menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan; dan
2. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Distributionally Sensitive Index/P₂*), yang menunjukkan tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin.

Kemiskinan absolut dipandang sebagai bentuk kemiskinan paling parah, yang diukur berdasarkan kemampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan minimum untuk mempertahankan taraf hidup sesuai standar kemanusiaan paling rendah. Dalam konteks ini, BPS menetapkan batas minimum pengeluaran yang disebut dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menggambarkan jumlah penduduk miskin adalah *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin (P_0) ini digunakan sebagai variabel terikat (*dependen*) dalam penelitian.

Penelitian ini tidak hanya melihat pengaruh variabel-variabel makroekonomi terhadap persentase penduduk miskin (P_0), tetapi juga memperhatikan indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) sebagai ukuran tambahan yang memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kondisi kemiskinan di daerah penelitian. Berdasarkan teori-

teori penyebab kemiskinan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini membatasi kajian pada faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut versi BPS, yaitu faktor-faktor ekonomi makro yang berpengaruh secara langsung terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Upah Minimum (UMR), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Inflasi di Provinsi Jawa Barat.

2.1.2 Upah Minimum

2.1.2.1 Pengertian Upah Minimum

Upah menurut Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 1 angka 1 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sementara itu, pengertian upah menurut Sukirno (2016: 52) yaitu pembayaran kepada para pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti halnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar.

Teori upah-efisiensi (*efficiency wage*) mengajukan salah satu penyebab dari kekakuan upah. Teori ini menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Perusahaan gagal untuk memangkas upah walaupun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, karena meskipun akan mengurangi tagihan upah perusahaan, pengurangan upah juga akan memperendah produktivitas pekerja dan laba perusahaan (Sukirno, 2016).

Upah minimum adalah suatu standar minimum atau pedoman yang

digunakan oleh para pengusaha maupun pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha. Menurut Kuncoro (2017:107), kemiskinan terjadi akibat adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Dimana SDM yang rendah berarti produktivitas seseorang tersebut juga rendah, dan menyebabkan upah juga rendah.

Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Untuk itu dalam undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan (Mankiw, 2014). Menurut Kaufman (2014: 301), tujuan utama ditetapkannya upah minimum itu sendiri adalah untuk memenuhi standar hidup pokok mereka seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan mereka. Upah minimum ini bertujuan mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.

2.1.2.2 Teori Upah Minimum

Menurut teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu (Sukirno, 2016).

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan (Sumarsono, 2003). Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi.

Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*.

2. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect*.

Definisi upah pada UU No 13 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

2.1.2.3 Rumus Penetapan Upah Minimum

Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan

rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dijelaskan bahwa bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan.

Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Penetapan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDRB_t)\}$$

Dimana:

UM_n = Upah minimum yang akan ditetapkan,

UM_t = Upah minimum tahun berjalan,

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan,

$\Delta PDRB_t$ = Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode

kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.

2.1.2.4 Teori Hubungan Upah Minimum Dengan Tingkat Kemiskinan

Upah minimum berfungsi guna memenuhi standar minimum kehidupan seperti kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja sehingga dengan adanya upah minimum diharapkan akan mengangkat masyarakat yang berpendapatan rendah.

Card & Krueger (2015) menantang pandangan neoklasik tradisional bahwa kenaikan upah minimum selalu menyebabkan penurunan tenaga kerja. Mereka menunjukkan bukti empiris (*natural experiments*) bahwa kenaikan upah tidak selalu mengurangi pekerjaan di industri tertentu, sehingga potensi pengurangan kemiskinan dari upah minimum menjadi lebih mungkin direalisasikan dalam kondisi tertentu.

Menurut Jundi (2014), semakin meningkatnya upah minimum maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka akan mengurangi tingkat kemiskinan.

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2.1.3.1 Pengertian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut BPS Indonesia (2024) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak mempunyai mata pencaharian dan sedang mencari pekerjaan di masing-masing provinsi yang dinyatakan dalam persen.

Pengangguran terbuka menurut Djohanputro (2006:69) adalah mereka yang

ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Menurut Sri Budhi (2013: 13) negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara maju maupun negara sedang berkembang tidak mampu memberikan tunjangan kepada warga negaranya yang menganggur, sedangkan negara maju mampu memberikan jaminan itu.

2.1.3.2 Teori Tingkat Pengangguran Terbuka

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang Teori-Teori Pengangguran di Indonesia yaitu :

a. Teori Klasik

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso. 2013).

Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil (Tohar. 2000).

b. Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, dkk, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

c. Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Dalam dia punya esai yang orisinal, Malthus menyuguhkan idenya dalam bentuk yang cukup kaku. Dia

mengatakan penduduk cenderung tumbuh secara “deret ukur” (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderung tumbuh secara “deret hitung” (misalnya, dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya). Dalam karyanya yang terbit belakangan, Malthus menekankan lagi tesisnya, namun tidak sekaku semula, hanya saja dia berkata bahwa penduduk cenderung tumbuh secara tidak terbatas hingga mencapai bata persediaan makanan. Dari kedua uraian tersebut Malthus menyimpulkan bahwa kuantitas manusia akan terjerumus ke dalam kemiskinan kelaparan. Dalam jangka panjang tidak ada kemajuann teknologi yang mampu mengalihkan keadaan karena kenaikan supply makanan terbatas sedangkan “pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memproduksi makanan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia”.

Apabila ditelaah lebih dalam toeri Malthus ini yang menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan, dalam hal ini menimbulkan manusia saling bersaing dalam menjamin kelangsungan hidupnya dengan cara mencari sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada Sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi memperoleh bahan makanan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.

d. Teori Sosiologi Ekonomi No-Marxian

Berawal dari analisis Marx pada awal abad 20 tentang struktur dan proses ekonomi yang dapat dibayangkan sebagai sistem kapitalisme kompetitif. Industri kapitalis yang ada pada zaman itu tergolong masih kecil dan belum ada satupun yang memegang perekonomian dan mengendalikan pasar. Namun Marx yakin pada suatu saat apabila kapitalisme sudah muncul dengan demikian pesatnya maka akan memunculkan kompetisi antar industri yang menjadi semakin pesat dan kemudian menghasilkan sistem monopoli dari industri yang paling kuat dalam persaingan tersebut. Dengan munculnya monopoli modal ini maka akan ada satu perusahaan besar yang akan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dalam perekonomian kapitalis.

Dalam pengembangan analisis Marx yang dianut oleh para penganut Marxian yang baru ini konsep “kelas buruh” tidak mendeskripsikan sekelompok orang atau sekelompok pekerjaan tertentu, tetapi lebih merupakan pembelian dan penjualan tenaga kerja. Para tenaga kerja tidak mempunyai alat produksi sama sekali sehingga segolongan orang terpaksa menjual tenaga mereka kepada Sebagian kecil orang yang mempunyai alat produksi.

Dari uraian diatas maka dapat kita telaah lagi bahwa dengan adanya pergantian antara sistem kapitalis kompetitif menjadi kearah sistem kapitalis monopoli, maka akan terdapat sebagian perusahaan yang masih tidak mampu bersaing dan menjadi terpuruk. Apabila semua proses produksi dan pemasaran semua terpengaruh oleh sebuah perusahaan raksasa saja, maka akan mengakibatkan perusahaan kecil menjadi sangat sulit dan hal pemasaran, bisa saja perusahaan kecil

tersebut mengalami kebangkrutan dan tidak lagi mampu menggaji pekerjanya. Setelah perusahaan tersebut tidak mampu beroperasi lagi, maka para pekerja yang semula bekerja dalam perusahaan tersebut menjadi tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kemudian akhirnya pekerja tersebut menjadi pengangguran.

2.1.3.3 Rumus Perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah Persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk menghitung TPT dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\textit{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\textit{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\textit{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Pengangguran terbuka merupakan keadaan dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran ini terjadi sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak bisa mendapat pekerjaan. Akibat dari keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Sehingga mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karena itu dinamakan pengangguran terbuka (Sukirno, 2016).

2.1.3.4 Teori Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka Dengan Tingkat Kemiskinan

Menurut teori labour market equilibrium, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja menciptakan pengangguran, dan jika tidak ditopang oleh jaring pengaman sosial, kondisi tersebut menyebabkan kemiskinan

absolut dan relatif.

Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan berkurangnya pendapatan agregat masyarakat dan memperburuk kemiskinan, karena banyak individu kehilangan sumber utama penghidupan (Todaro dan Smith, 2015).

Pengangguran menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi, di antaranya berkurangnya pendapatan masyarakat, menurunnya daya beli, dan meningkatnya jumlah penduduk miskin. (Sukirno, 2016).

Dapat disimpulkan secara ekonomi, pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan positif: Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin besar kemungkinan meningkatnya tingkat kemiskinan. Hal ini karena pengangguran berarti kehilangan sumber pendapatan sehingga rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.

2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1 Pengertian Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2016:331) Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan guna mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara yang meningkat dapat disebabkan oleh penambahan faktor- faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi juga akan menambah dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang seiring perkembangan teknologi yang pesat. Di samping itu, tenaga kerja bertambah

sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Kuznets (dalam Boediono, 2014) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai macam jenis barang - barang ekonomi dalam jumlah yang banyak kepada penduduknya. Adanya kemajuan atau penyesuaian - penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada menentukan kenaikan kapasitas itu sendiri.

2.1.4.2 Teori Laju Pertumbuhan Ekonomi

Teori *trickle-down effect* Arthur Lewis (1954) dijelaskan bahwa kemakmuran yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu baru akan dirasakan oleh penduduk miskin apabila penduduk kaya membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang mereka rasakan.

Teori *trickle-down effect* menyatakan bahwa jalan terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan membiarkan orang kaya atau pemilik modal berkembang. Sebagai contoh dari adanya efek penurunan pajak maka para pemilik modal akan mempunyai lebih banyak uang dan akan menyalurkan kekayaan mereka dengan pendirian bisnis atau meningkatkan bisnisnya seperti mendirikan

pabrik. Dengan adanya pabrik baru yang didirikan maka dapat membuka lowongan kerja baru dan akan membuka banyak lowongan pekerjaan dan akan menyerap para tenaga kerja sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan angka berimbas pada angka kemiskinan menurun.

2.1.4.3 Rumus Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami peningkatan apabila tingkat pendapatan ekonomi wilayah yang telah dicapai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, perkembangan ekonomi di suatu wilayah semakin baik jika jumlah fisik barang dan jasa yang dihasilkan menjadi semakin besar setiap tahunnya. Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB_t = PDRB tahun berjalan

PDRB_{t-1} = PDRB tahun sebelumnya

Banyak juga literatur ekonomi yang mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk presentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2016:9).

2.1.4.4 Teori Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Tingkat Kemiskinan

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan negatif artinya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat kemiskinan cenderung menurun. Namun, efek penurunan kemiskinan sangat bergantung pada pemerataan hasil pertumbuhan (*distributional effects*). Jika pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok kaya (*growth without equity*), maka kemiskinan bisa tetap tinggi meskipun ekonomi tumbuh cepat.

Pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan meningkat, namun setelah mencapai titik tertentu, pertumbuhan ekonomi justru mengurangi kemiskinan (Simon Kuznets, 1955).

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu bagi pengentasan kemiskinan, tetapi tidak cukup bila tidak disertai distribusi pendapatan yang adil dan kesempatan kerja yang luas (Todaro & Smith, 2015).

Dapat disimpulkan Pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kemiskinan apabila disertai kebijakan pemerataan seperti pendidikan, pemerataan infrastruktur, dan akses ke pekerjaan produktif.

1.1.5 Inflasi

1.1.5.1 Pengertian Inflasi

Boediono (2014:155) mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Menurut Nanga (2000:241), setidaknya ada tiga hal yang perlu ditekankan dalam memahami inflasi, yaitu:

1. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti bisa saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu naik atau turun, tetapi tetap menunjukkan tendensi atau kecenderungan yang meningkat.
2. Kenaikan tingkat harga tersebut terjadi secara terus-menerus (*sustained*), yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, tetapi beberapa waktu lamanya. Kenaikan harga yang sifatnya sementara seperti pada saat momen-momen tertentu seperti hari raya tidak dapat dikatakan sebagai inflasi.
3. Tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga umum, bukan hanya satu atau beberapa komoditas saja. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan harga itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya.

Keynes dalam (Boediono, 2014) menyatakan bahwa inflasi terjadi disebabkan masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Inflasi terjadi karena pengeluaran agregat terlalu besar. Oleh karena itu, solusi yang harus diambil adalah dengan jalan mengurangi jumlah pengeluaran agregat itu sendiri (mengurangi pengeluaran pemerintah atau dengan meningkatkan pajak dan kebijakan uang ketat. Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes ini, bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan terjadi *inflationary gap*. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan

agregat. Karenanya teori ini dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek.

2.1.5.2 Teori Inflasi

Menurut teori kuantitas dalam (Boediono, 2014), pada prinsipnya mengatakan bahwa timbulnya inflasi itu hanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah uang yang beredar dan bukan disebabkan oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan teori ini ada 2 faktor yang menyebabkan inflasi.

1. Jumlah uang yang beredar.

Semakin besar jumlah uang yang beredar dalam masyarakat maka inflasi juga akan meningkat. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah harus memperhitungkan atau memperkirakan akan timbulnya inflasi yang bakal terjadi bila ingin mengadakan penambahan pencetakan uang baru, karena pencetakan uang baru yang terlalu besar akan mengakibatkan goncangnya perekonomian.

2. Perkiraan atau anggapan masyarakat bahwa harga-harga akan naik.

Jika masyarakat beranggapan harga-harga akan naik maka tidak ada kecenderungan untuk menyimpan uang tunai lagi, masyarakat akan menyimpan uang mereka dalam bentuk barang sehingga permintaan akan mengalami peningkatan. Hal ini mendorong naiknya harga secara terus-menerus.

Berdasarkan Teori Keynesian dalam (Boediono, 2014), inflasi terjadi karena permintaan agregat (*aggregate demand*) melebihi kapasitas produksi perekonomian (*full employment*) atau disebut juga sebagai *demand-pull inflation*. Keynes menekankan bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus digunakan untuk menekan permintaan agregat agar inflasi terkendali.

2.1.5.3 Rumus Perhitungan Inflasi

Tingkat inflasi dapat dihitung berdasarkan masing-masing tingkat harga dari beberapa macam barang kebutuhan pokok masyarakat yang diperjual belikan dipasar. Berdasarkan harga-harga tersebut dapat disusun menjadi sebuah rumus untuk menghitung inflasi yaitu Indeks Harga Konsumen yang biasanya dapat dihitung setiap 3 bulan dan 1 tahun (Iskandar, 2013:418). Adapun rumus menghitung inflasi menurut Iskandar (2013:418), yaitu sebagai berikut.

$$Inf = \frac{IHK_n - IHK_o \times 100\%}{IHK_o}$$

Keterangan:

Inf = Tingkat inflasi

IHK_n = Indeks harga konsumen tahun dasar (dalam hal ini nilainya 100).

IHK_o = Indeks harga konsumen tahun sebelumnya.

Menurut Gilarso (2013) angka inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik dari persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada suatu saat dibandingkan dengan IHK pada periode sebelumnya. IHK adalah perbandingan dengan harga-harga barang dan jasa tersebut pada tahun dasar, dan dinyatakan dalam persen. Rumus yang digunakan untuk menghitung IHK adalah formula Laspeyres, dan dapat dihitung dengan metode angka kumulatif, rata-rata per tahun, atau dari Desember ke Desember. Untuk dapat menghitung IHK diperlukan data dan informasi yang luas, yang diperoleh dari survei biaya hidup berdasarkan harga pasar untuk berbagai macam barang dan jasa yang mencerminkan pola konsumsi masyarakat. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK - IHK_0 \times 100\%}{IHK_0}$$

Dengan IHK adalah Indeks Harga Konsumen tahun dasar yang nilainya sebesar 100, sedangkan IHK₀ adalah Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya. Berdasarkan sumber ukuran untuk tingkat inflasi yang telah dikemukakan diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Inf} = \frac{IHK_n - IHK_0 \times 100\%}{IHK_0}$$

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator diatas dengan alasan bahwa indikator indeks harga konsumen digunakan secara umum termasuk oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Sehingga angka-angka yang muncul sesuai dengan apa yang telah diolah oleh Bank Indonesia dan mencerminkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok secara umum berskala nasional.

2.1.5.4 Teori Hubungan Inflasi Dengan Tingkat Kemiskinan

Inflasi dan kemiskinan merupakan dua indikator utama kesejahteraan ekonomi. Secara umum, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali cenderung meningkatkan kemiskinan, karena menurunkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah, sedangkan inflasi moderat kadang justru mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja yang pada akhirnya menurunkan kemiskinan.

Inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, sehingga menambah jumlah penduduk miskin. (Sukirno, 2016).

Inflasi yang tidak diprediksi menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Kelompok miskin yang berpenghasilan tetap paling terdampak karena harga kebutuhan pokok naik, sementara pendapatan nominal mereka tidak berubah (Mankiw, 2014).

Todaro & Smith menegaskan bahwa inflasi di negara berkembang memiliki dampak sosial lebih besar, karena mayoritas penduduk berpenghasilan tetap dan menghabiskan sebagian besar pendapatan untuk konsumsi kebutuhan pokok (Todaro & Smith, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa hubungan inflasi dan kemiskinan tidak selalu linear, tetapi tergantung pada tingkat inflasi, stabilitas harga, dan kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan harga.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Beberapa penelitian tersebut dapat dilihat dari tabel 2.2.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
1	Hendri Andika Saputra, Dastanta Irvan Ginting, Sukardi, Ahmad Albar Tanjung (2023)	<i>The effect of unemployment and economic growth on poverty in West Sumatra Province</i>	1. Tingkat Kemiskinan 2. TPT 3. LPE	1. Inflasi 2. UMR	Analisis menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka panjang	International Journal of Applied Finance and Business Studies IJAFIBS, 11 (3) (2023) pp. 430-440

No	Peneliti	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
2	Miftah Nariyah, Agustiani, Sabina Adilia, Erica Della Rosa, Maya Panorama (2023)	<i>Analysis Impact Of Minimum Wage And Open Unemployment To Poverty Level In Indonesia</i>	1. UMR 2. TPT 3. Tingkat Kemiskinan	1. Inflasi 2. LPE	Berdasarkan hasil penelitian, UMR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.	Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Vol.1 No.3 Oktober 2022 - Januari 2023
3	Rizaldi Naftali Welang, George Manuel Viktor Kawung, Hanly Fenly Djohar Siwu (2024)	Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2022	1. UMR 2. TPT 3. Tingkat Kemiskinan	1. Inflasi 2. LPE	- Upah Minimum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara - Pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 24 No. 4 April 2024
4	Elza Dwi Lestari, Muhammad Yusuf Bahtiar, Is Susanto (2024)	<i>The Influence Of Economic Growth, Provincial Minimum Wage, Open Unemployment Rate And Education On Poverty In Lampung Province In 2010-2023 From The Perspective Of Maslahah Maqashid Al-Syariah</i>	1. LPE 2. UMR 3. TPT 4. Tingkat Kemiskinan	1. Pendidikan 2. Inflasi	- Hasil penelitian jangka pendek menunjukkan bahwa hanya variabel pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif terhadap kemiskinan. - Dalam jangka panjang, variabel upah minimum provinsi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung, - Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.	Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN) Volume 05 Nomor 02 Tahun 2024
5	Joko Susanto (2018)	Impact Of Economic Growth,	1. Inflasi 2. LPE 3. UMR	1. TPT	- Pertumbuhan ekonomi berdampak	Media Ekonomi & Teknologi Informasi Vol. 22

No	Peneliti	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
		Inflation And Minimum Wage On Poverty In Java	4. Tingkat Kemiskinan		negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa, - Inflasi berdampak positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa. - UMR tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa	No. 1 Maret 2018 : 32 – 41
6	Retno Ajeng Sugesti, Moneyzar Usman (2024)	<i>The Effect of Inflation, Open Unemployment Rate, Farmer Exchange Rate, and Provincial Minimum Wage on Poverty in the 15 Poorest Provinces in Indonesia</i>	1. Tingkat kemiskinan 2. Inflasi 3. TPT 4. UMR	1. LPE 2. Nilai Tukar Petani	- Inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan. - Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan - Nilai tukar petani memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan - Upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan	IJEBIR, Volume 03 Issue 05, 2024
7	Arif Rahman (2019)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi	1. Tingkat kemiskinan 2. Inflasi 3. LPE 4. TPT	1. UMR	- Pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jambi. - Inflasi dan pengangguran memberikan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan penduduk di Provinsi Jambi.	e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 8. No. 3, September-Desember 2019 ISSN: 2303-1220 (online)
8	Miss Romuelah Seena (2016)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Thailand	1. Tingkat Kemiskinan 2. Upah Minimum	Negara Penelitian LPE Inflasi TPT Pendidikan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Thailand, sedangkan	Jurnal Pendidikan Ekonomi Syariah, 8(2), 85–101.

No	Peneliti	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
					variabel upah minimum dan pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Thailand	
9	Nurdini, Yusrizal, Aqwa Naser Daulay (2024)	<i>The Influence of Open Unemployment Rates, Inflation and Minimum Wages on Income Inequality in The North Sumatra Region</i>	1. TPT 2. Inflasi 3. UMR 4. Tingkat Kemiskinan	1. LPE 2. Ketimpangan Pendapatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan	Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 8 (2024)
10	Sutrisno (2022)	<i>The Impact Of Provincial Minimum Wage Increases and Economic Growth Rates on Poverty Levels in DKI Jakarta</i>	1. LPE 2. UMR 3. Tingkat Kemiskinan	1. Inflasi 2. TPT	- Kenaikan UMR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta - Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.	Jurnal Ekonomi, Volume 11, No 03, 2022 ISSN: 2301-6280 (print) ISSN: 2721-9879 (online)
11	Rahma Amalia, Lastri Khafiah, Tahta Rajani, Muhammad Kurniawan (2024)	Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Timur Tahun 2014-2023	1. Tingkat Kemiskinan 2. UMR 3. TPT	1. Pendidikan 2. Inflasi 3. LPE	- Upah minimum dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur, - Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.	Journal Economic Excellence Ibnu Sina Vol.2, No.2 Juni 2024
12	Aditya Ramadan, Ageng Teguh Antonia Roselina, Luthfia Andriastuti	<i>The influence of regional minimum wages and unemployment rates on Poverty Levels in Indonesia:</i>	1. UMR 2. TPT 3. Tingkat Kemiskinan	1. LPE 2. Inflasi	UMR berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. TPT berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.	EMAGRAP Economic Military and Geographically Business Review EMAGRAP 2(1): 1-15 ISSN 3025-3160

No	Peneliti	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
	(2024)	<i>Multiple linear regression analysis</i>				
13	Slamet Yanu Christianto, Dwi Prasetyani, Tetuko Rawidyo Putro (2022)	<i>The Effect of Inflation Rate, Economic Growth Rate and Minimum Wages on Poverty Levels Rate in East Java Year 2013–2021</i>	1. LPE 2. Tingkat Kemiskinan 3. UMR 4. Inflasi	1. TPT	- Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, - Terdapat pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan	International Journal of Economics, Business and Management Research Vol. 6, No.12; 2022
14	Risnanda, Mahrizal, Yayuk Eko Wahyuning sih (2024)	Pengaruh Inflasi, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2022	1. Inflasi 2. UMR 3. TPT 4. Tingkat Kemiskinan	1. LPE	- Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin - Upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin - Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin	Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 1 No. 2, Juli, 2024 Hal. 715-727
15	Nurul Hindayati (2021)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2020	1. LPE 2. TPT 3. UMR 4. Tingkat Kemiskinan	1. Inflasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sementara untuk variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan.	Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 21 No.3, Desember 2016

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Antara Upah Minimum Dengan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

Usaha untuk mensejahterakan masyarakat yang berpendapatan rendah merupakan tujuan dari upah minimum. Menurut Nurkse dan Sukirno (2016), upah yang rendah di bawah minimum akan mempengaruhi tabungan jika tidak ada tabungan maka akan menyulitkan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bahkan ada yang tidak mencukupi untuk biaya hidup sehingga menimbulkan kemiskinan.

Pengangguran (*unemployment*) yang terus meningkat dapat mempengaruhi adanya negara yang sejahtera atau (*welfare state*) karena semakin banyaknya tenaga kerja yang menganggur di suatu negara akan menghambat proses pembangunan dan akan menambah angka kasus kriminalitas yang timbul dari ketidakmampuan mencukupi kebutuhan hidupnya, dan apabila proses pembangunan terhambat maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga tidak dapat berkembang dengan baik maka negara tersebut belum dapat dikatakan sejahtera apabila belum mampu mencukupi kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, bantuan keuangan untuk warga yang tidak mampu bekerja atau pengangguran.

Menurut Kaufman (2014), tujuan utama ditetapkan upah minimum itu sendiri adalah untuk memenuhi standar hidup pokok mereka seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan mereka. Upah minimum ini bertujuan mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Upah minimum dapat memberi respon pada penurunan jumlah penduduk miskin

karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Menurut teori *trickle down effect*, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan daya beli pekerja, mengurangi kemiskinan. Namun, jika kenaikan upah terlalu tinggi, bisa menurunkan kesempatan kerja, terutama di sektor informal, yang justru meningkatkan kemiskinan (Sukirno, 2016).

Hal ini menunjukkan terdapat hubungan negatif antara upah minimum dengan tingkat kemiskinan, sebagaimana dibuktikan oleh beberapa penelitian sebelumnya dari (Agustiani *et al.*, 2023) serta penelitian (Lestari *et al.*, 2024) yang menyatakan Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2.2.2 Hubungan Antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian Rizaldi *et al.*, (2024) menemukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun. Dalam teori, selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya adalah pasti miskin.

Menurut Arsyad (2016) ada hubungan yang erat antara tingkat pengangguran dengan kemiskinan. Bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu selalu berada di kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja di sektor pemerintah, sektor resmi lainnya

adalah kelompok masyarakat kelas menengah ke atas termasuk golongan tidak miskin, semakin banyak pencari kerja tetapi peluang kerja yang sempit akan memperparah jumlah pengangguran. Sehingga apabila pengangguran meningkat dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akan meningkatkan kemiskinan.

Sukirno (2016) menjelaskan bahwa meningkatnya pengangguran akan menurunkan pendapatan masyarakat, menyebabkan daya beli menurun dan memperluas kemiskinan. Dengan demikian, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan bersifat positif dimana semakin tinggi TPT, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

Semakin tinggi angka pengangguran maka angka kemiskinan akan naik pula, sebaliknya apabila angka pengangguran dapat ditekan sehingga masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan begitu angka kemiskinan akan berkurang pula.

2.2.3 Hubungan Antara Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

Menurut teori *trickle down effect* menyebutkan bahwa kemakmuran yang diperoleh sekelompok masyarakat akan menetes sendirinya hingga ke bawah dalam hal ini adalah masyarakat miskin dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan maupun berbagai peluang ekonomi yang secara bergiliran dapat menumbuhkan kondisi yang menciptakan distribusi pertumbuhan ekonomi yang secara merata sehingga dapat dirasakan oleh semua pihak. Dengan begitu, apabila masyarakat miskin telah dapat merasakan peluang ekonomi ini maka dapat mengurangi angka kemiskinan. Namun, teori tersebut juga mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti arah vertical dari penduduk kaya ke penduduk miskin.

Manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini tentunya akan dirasakan oleh penduduk kaya terlebih dahulu baru nantinya akan dirasakan oleh penduduk miskin apabila penduduk kaya ini dapat membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang mereka rasakan.

Menurut teori *trickle down effect* (Todaro & Smith, 2015), pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Namun, jika pertumbuhan tidak inklusif, manfaatnya tidak akan dirasakan oleh kelompok miskin.

Hasil penelitian Susanto (2018) menunjukkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Jawa. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari kenaikan produk domestik bruto (PDB). Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, semakin banyak pula sumber daya yang dibutuhkan, termasuk sumber daya manusia. Sekelompok masyarakat yang awalnya menganggur atau setengah menganggur kini terlibat penuh dalam proses produksi. Mereka memperoleh keuntungan sampingan dari proses produksi sehingga pendapatan mereka meningkat dan pada gilirannya mereka dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

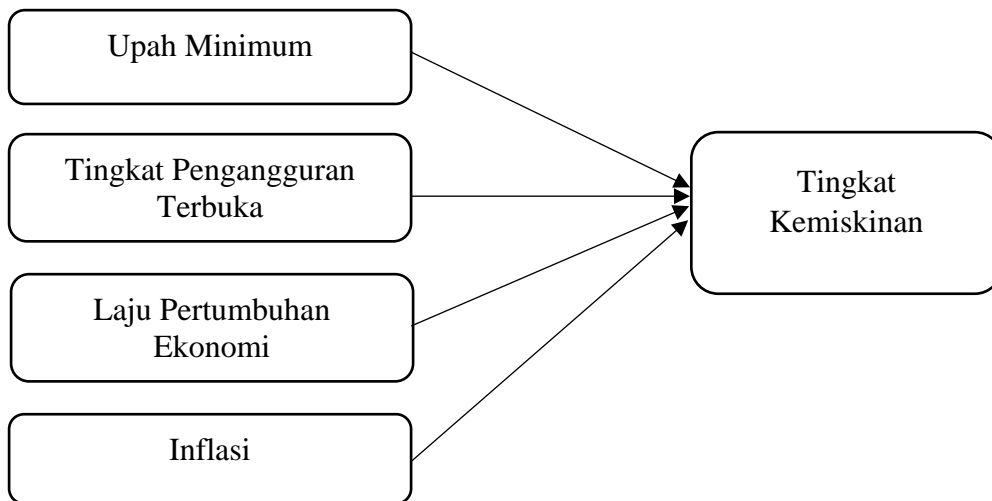
2.2.4 Hubungan Antara Inflasi dengan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

Teori ekonomi Keynesian (Todaro dan Smith, 2015) memandang inflasi dianggap memengaruhi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lebih berat karena mereka cenderung memiliki pendapatan tetap yang tidak menyesuaikan dengan kenaikan harga (inflasi). Hal ini menunjukkan Inflasi dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang erat, di mana peningkatan inflasi sering kali

memperburuk kondisi kemiskinan. Inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya mengurangi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, kelompok masyarakat miskin paling merasakan dampaknya karena proporsi penghasilan mereka yang lebih besar digunakan untuk kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan energi. Akibatnya, mereka semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, yang dapat mendorong lebih banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan. Selain itu, inflasi yang tidak terkendali juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mempersempit kesempatan kerja, yang berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran dan memperparah kondisi kemiskinan secara keseluruhan.

Menurut teori Keynes, inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat terutama kelompok berpendapatan tetap, sehingga meningkatkan kemiskinan. Namun, inflasi moderat dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya menurunkan kemiskinan.

Uraian di atas sesuai dengan hasil penelitian Susanto (2018) dan hasil penelitian Arif Rahman (2019) yang menyimpulkan terdapat pengaruh positif inflasi terhadap tingkat kemiskinan, Inflasi menunjukkan penurunan pendapatan riil sehingga daya beli masyarakat juga berkurang. Barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat berkurang, sehingga konsumsi masyarakat akan menurun. Penurunan konsumsi ini menunjukkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian peningkatan inflasi menyebabkan lebih banyak kelompok masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan sehingga tingkat kemiskinan meningkat.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Diduga secara parsial upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sedangkan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2024
- b. Diduga secara Bersama-sama Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2024.